



Judul : Tajuk Rencana. Vaksin Berbayar
Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 11



Tajuk RENCANA

Vaksin Berbayar

MASALAH pandemi dan penyakit menular ini pun bukan merupakan persoalan individu, melainkan menjadi masalah seluruh warga negara. Bahkan, pandemi Covid-19 ini menjadi permasalahan global. Karenanya, pemerintah berkewajiban memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.



DI tengah ancaman virus Covid-19 yang semakin menggila, muncul program vaksinasi Covid-19 berbayar atau vaksin gotong royong (VGR) untuk individu. Padahal, semula VGR itu hanya dibebankan kepada perusa-

haan swasta dan akan diberikan secara gratis kepada para karyawannya.

Sebagaimana diberitakan harian ini, Senin (12/7/2021), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Kimia Farma Diagnostika siap memberikan VGR individu untuk masyarakat di Jawa dan Bali. Untuk program ini, Kimia Farma mengalokasikan 1,5 juta dosis vaksin. Kebijakan itu muncul setelah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Seseorang bisa membeli sendiri vaksin Covid-19 melalui VGR individu.

Pemerintah pun telah menetapkan harga vaksin dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu sebesar Rp 879.140 per orang. Harga tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Dengan rincian, harga vaksin per dosis Rp 321.660, ditambah dengan harga layanan Rp 117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada individu seharga Rp 439.570 per dosis.

Program vaksin bebayar bagi individu ini pun mendapat penolakan dari banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Menurutnya, vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak. Pasalnya, hal itu dilakukan saat masyarakat masih terdesak pandemi Covid-19 yang mengganas.



Penolakan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty meminta pemerintah mengkaji kembali program vaksin berbayar. Pemerintah jangan mencari untung dari rakyat. Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Maka, setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis.

Oleh karenanya, pemerintah hendaknya lebih fokus dalam menyelesaikan program vaksinasi nasional ketimbang membuka opsi vaksin berbayar. Pemerintah harus gencar berinovasi dalam menyelenggarakan vaksinasi, serta memperbanyak tenaga vaksinator dan menambah kuota vaksin di daerah.

Apalagi, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai target vaksinasi sebanyak 1 juta/hari selama Juli ini, dan 2 juta/hari pada Agustus nanti. Masyarakat masih banyak enggan, bahkan menolak untuk mengikuti vaksinasi. Untuk mengikuti vaksinasi yang digratiskan saja masih banyak yang menolak, apalagi harus bayar. Karenanya, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, melalui berbagai media.

Perbedaan jenis vaksin gratis dengan vaksin yang berbayar pun sangat mungkin akan mengganggu program vaksinasi nasional. Karena bisa jadi, masyarakat akan semakin ragu dengan kualitas vaksin tersebut, sehingga memilih untuk tidak mengikuti program vaksinasi nasional. Sementara untuk membeli vaksin berbayar, tidak semua orang mampu.

Padahal, vaksinasi ini sangat penting sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam mewujudkan kekebalan masyarakat (*herd immunity*). Hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dengan menggratiskan vaksin Covid. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis secara menyeluruh. Hal itu sesuai dengan prinsip keadilan. Apalagi, hal itu telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Masalah pandemi dan penyakit menular ini tentunya bukan merupakan persoalan individu, melainkan menjadi masalah seluruh warga negara. Bahkan, pandemi Covid-19 ini menjadi permasalahan masyarakat global. Karenanya, pemerintah berkewajiban memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika tidak, Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik dan memakan lebih banyak korban lagi.

Apalagi, kita terus berkejaran dengan waktu, dengan munculnya beberapa varian Covid baru. Sementara itu, tenaga kesehatan semakin kewalahan. Rumah-rumah sakit pun sudah penuh, sehingga program vaksinasi harus terus digenjut. Karenanya, janganlah berbisnis di tengah pandemi yang semakin berat ini. Fokus saja dengan program vaksinasi nasional sambil memperbaiki berbagai kekurangannya.***